

MEMBANGUN INDONESIA SEBAGAI WELFARE STATE (Sebuah Cermin Ideologis dari keruntuhan Rezim Orde Baru)

Oleh :
Mohammad Suud

Dua tema sentral yang diterapkan Orde Baru adalah demokratisasi politik dan perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi yang didahulukan dalam prakteknya, menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, hukum dan politik yang sangat krusial. Jika keluar yang dianggap tidak mengganggu strategi pembangunan ekonomi oleh Pemerintah Orde Baru adalah pembentukan konsumen melalui perbaikan konstitusional dengan mencanangkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya di masa reformasi ini, ide dasar yang menjadi nilai pokok dalam kebijakan kesejahteraan sosial harus diubah dari "equality of out put" menjadi "equality of opportunity" dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang membangun adanya negara welfare state.

Orde baru sebagai suatu masyarakat politik berusaha mewujudkan tujuan dan cita-citanya, serta merstrukturisasi lembaga-lembaga politik mana saja untuk mencapai tujuannya tersebut. Pembangunan Nasional adalah merupakan kebulatan dari upaya untuk mewujudkan hal itu. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara telah meletakkan dasar dan arah pembangunan jangka panjang, yaitu bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pada awal pemerintahan orde baru, ada dua tema sentral yang ditonjolkan, yaitu demokratisasi politik dan perbaikan

ekonomi. Kedua tema sentral yang menjadi program utama itu sekaligus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan besar. Dalam bidang politik yang menjadi tantangan adalah persoalan legitimasi. Artinya, cara manakah - dari kedua tema sentral tersebut - yang harus ditempuh oleh pemerintah orde baru untuk mengesahkan pemerintahannya? Cara yang kemudian ditempuh oleh pemerintah orde baru adalah mengadakan perbaikan ekonomi. Kondisi perekonomian kala itu nampaknya secara obyektif memang terasa sangat mendesak untuk diperbaiki sebagai akibat dari hiperinflasi, menipisnya cadangan devisa, defisit anggaran belanja, dan langkanya barang konsumsi. Kita kiranya dapat memaklumi bahwa dalam program perbaikan ekonomi tersebut hendak